Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Pengaturan Transportasi dan Jalan di Jawa dan Madoera Tahun 1906: Kajian terhadap *Staatsblad van Nederlandsch-Indië*

Husnul Hotimah
UIN Sunan Ampel Surabaya
husnulshi23@gmail.com

Abstrak: Transportasi dan jalan merupakan bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan administrasi pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Pada awal abad ke-20, pengaturan transportasi darat tidak hanya berkaitan dengan pergerakan barang dan manusia, tetapi juga berhubungan dengan kegiatan pertanian dan industri. Artikel ini membahas pengaturan transportasi dan jalan di Jawa dan Madoera pada tahun 1906 berdasarkan *Staatsblad van Nederlandsch-Indië*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pengaturan transportasi dan jalan serta menganalisis keterkaitannya dengan kepentingan pemerintah kolonial terhadap kegiatan pertanian dan industri. Penelitian menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer yang digunakan adalah *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* tahun 1906, khususnya ketentuan mengenai jalan, transportasi, pertanian, dan industri di Jawa dan Madoera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan transportasi dan jalan pada tahun 1906 mencakup penataan tanggung jawab terhadap pemeliharaan infrastruktur serta dampak kegiatan pengangkutan terhadap kondisi jalan. Ketentuan tersebut menunjukkan keterkaitan antara pengelolaan infrastruktur transportasi dengan aktivitas ekonomi kolonial. Dengan demikian, pengaturan transportasi dan jalan menjadi bagian dari tata kelola pemerintah kolonial dalam menunjang kepentingan ekonomi dan administrasi di Jawa dan Madoera.

Kata Kunci: *transportasi, jalan, Madoera, kolonial, Staatsblad.*

PENDAHULUAN

Transportasi menjadi salah satu unsur penting dalam perkembangan ekonomi dan administrasi pada masa kolonial di Hindia Belanda. Keberadaan jalan, kereta api, dan trem memungkinkan aktivitas manusia serta barang antara wilayah produksi dan pusat distribusi berjalan dengan baik. Perkembangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan mobilitas, tetapi juga dengan kepentingan pemerintah kolonial dalam mengatur infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi. Jalan, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghubung antar daerah, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas pertanian, industri, dan pengangkutan hasil produksi. Pembangunan dan pengaturan infrastruktur dengan demikian menjadi bagian dari proses pengelolaan wilayah kolonial. Ravesteijn dan ten Horn-van Nispen menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur

publik di Hindia Belanda, termasuk jalan dan sarana transportasi, berkaitan dengan perkembangan administrasi serta kepentingan ekonomi pemerintah kolonial.

Memasuki awal abad ke-20, persoalan transportasi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana pengangkutan, tetapi juga dengan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan infrastrukturnya. Aktivitas pengangkutan dapat menimbulkan kerusakan pada jalan sehingga diperlukan ketentuan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap perbaikannya. Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena jalan digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi, termasuk pertanian dan industri. Dengan demikian, aturan mengenai transportasi dan jalan dapat digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah kolonial mengatur hubungan antara aktivitas pengangkutan, kepentingan ekonomi, dan pemeliharaan infrastruktur.

Jawa dan Madoera merupakan bagian dari wilayah yang berada dalam pengaturan pemerintah kolonial tersebut. Perkembangan transportasi di kedua wilayah tidak hanya berlangsung melalui jalur laut, tetapi juga melalui jalan, kereta api, dan trem. Di Madura, misalnya, perkembangan *Madoera Stoomtram Maatschappij* sejak 1897 berkaitan dengan pengangkutan garam dan kemudian berkembang sebagai sarana transportasi umum. Penelitian mengenai Madoera Stoomtram Maatschappij menunjukkan bahwa transportasi memiliki hubungan erat dengan kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat di Madura. Sementara itu, penelitian mengenai perkembangan jaringan transportasi di Jawa menunjukkan adanya keterkaitan antara jaringan pengangkutan, wilayah produksi, dan pusat perdagangan. Kajian mengenai jalan di wilayah perkotaan juga memperlihatkan bahwa perkembangan jalan dapat berkaitan dengan perubahan aktivitas ekonomi dan ruang sosial.

Meskipun demikian, penelitian mengenai transportasi kolonial lebih banyak membahas perkembangan jaringan transportasi, perusahaan kereta api dan trem, fungsi ekonomi transportasi, atau perubahan fungsi jalan. Penelitian Mahdiyar dkk., misalnya, membahas Madoera Stoomtram Maatschappij dan perkembangannya sebagai sarana pengangkutan garam hingga transportasi umum.(Faniesa Ardianti Mahdiyar, Naning Siregar Pribumi, Sopia Nabila 2022) Penelitian mengenai perkembangan jalan juga lebih banyak melihat perubahan fungsi jalan serta kaitannya dengan perkembangan wilayah. Kajian mengenai infrastruktur kolonial oleh Ravesteijn dan ten Horn-van Nispen menempatkan pembangunan jalan dan pekerjaan umum dalam konteks perkembangan negara kolonial. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai

perkembangan infrastruktur dan transportasi, tetapi belum secara khusus membahas pengaturan transportasi dan jalan berdasarkan ketentuan resmi pemerintah kolonial pada tahun 1906.

Persoalan tersebut dapat ditelusuri melalui *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* tahun 1906. Sumber ini merupakan publikasi resmi pemerintah kolonial yang memuat berbagai ordonansi dan keputusan yang berlaku di Hindia Belanda. Dalam *Staatsblad* tahun 1906 terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan transportasi. *Staatsblad* No. 415, misalnya, berjudul "Spoorwegen. Tramwegen. Reglementen" dan memuat perubahan terhadap peraturan umum mengenai layanan kereta api dan trem.(Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1906) Ketentuan tersebut mengatur berbagai aspek pengangkutan, termasuk pengiriman barang dan tanggung jawab dalam proses pengangkutan.

Selain peraturan mengenai kereta api dan trem, *Staatsblad* No. 418 tahun 1906 secara khusus memperlihatkan persoalan mengenai jalan. Ketentuan yang berjudul "Wegen. Kunstwerken. Landbouw. Nijverheid" berkaitan dengan aturan mengenai kerusakan jalan dan bangunan pelengkap jalan akibat *karretransport*.(Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1906) Aturan sebelumnya mewajibkan perusahaan pertanian dan industri swasta di Jawa dan Madoera untuk membayar biaya perbaikan kerusakan tertentu yang disebabkan oleh aktivitas pengangkutan tersebut. Pada tahun 1906, aturan tersebut dicabut dan ketentuan mengenai pengembalian pembayaran yang telah dilakukan berdasarkan aturan sebelumnya ditetapkan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa transportasi dan jalan merupakan bagian dari persoalan administratif sekaligus ekonomi pada masa kolonial.(Dara Sylvia 2025) Pengaturan mengenai kerusakan jalan akibat *karretransport* memperlihatkan adanya hubungan antara aktivitas pengangkutan dengan kegiatan pertanian dan industri. Sementara itu, perubahan aturan pada tahun 1906 menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kolonial terhadap penggunaan dan pemeliharaan infrastruktur dapat mengalami perubahan sesuai dengan pertimbangan administratif dan ekonomi. Oleh karena itu, *Staatsblad* tidak hanya penting sebagai dokumen hukum, tetapi juga dapat digunakan sebagai sumber sejarah untuk melihat bagaimana pemerintah kolonial mengatur transportasi dan infrastruktur jalan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah transportasi dengan menempatkan jalan dan sarana pengangkutan sebagai bagian dari hubungan antara

infrastruktur, aktivitas ekonomi, dan kebijakan pemerintah kolonial. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pengaturan transportasi dan jalan di Jawa dan Madoera pada tahun 1906 serta menganalisis keterkaitannya dengan kepentingan pemerintah kolonial terhadap kegiatan pertanian dan industri. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer utama berupa *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* tahun 1906, sedangkan artikel jurnal dan penelitian terdahulu digunakan sebagai sumber pendukung dan pembanding. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana pemerintah kolonial mengatur transportasi dan jalan di Jawa dan Madoera pada tahun 1906 serta bagaimana pengaturan tersebut memperlihatkan hubungan antara infrastruktur transportasi dan kepentingan ekonomi kolonial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Transportasi dan Jalan di Jawa dan Madoera Tahun 1906

Pengaturan transportasi pada tahun 1906 menunjukkan adanya upaya pemerintah kolonial untuk menata kegiatan pengangkutan melalui jalur kereta api dan trem. Hal tersebut terlihat dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 415 tentang *Spoorwegen. Tramwegen. Reglementen*. Ketentuan tersebut mengubah beberapa bagian dalam peraturan mengenai pelayanan kereta api dan trem, terutama yang berkaitan dengan pengangkutan barang, waktu pengiriman, serta tanggung jawab perusahaan angkutan.

Salah satu ketentuan penting berkaitan dengan waktu pengiriman barang. Lama pengangkutan ditentukan berdasarkan jenis barang dan jarak yang ditempuh. Apabila pengiriman menggunakan lebih dari satu jaringan kereta api atau trem, waktu pengangkutan dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku pada masing-masing jalur. Selain itu, diberikan tambahan waktu apabila dalam proses pengiriman terjadi pemindahan barang dari satu layanan transportasi ke layanan lainnya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa transportasi pada masa kolonial tidak hanya dipahami sebagai keberadaan sarana pengangkutan, tetapi juga sebagai layanan yang memiliki standar administratif. Pemerintah menetapkan ukuran waktu yang dapat digunakan untuk mengatur proses pengiriman, termasuk ketika barang harus melalui beberapa jaringan transportasi. Dengan demikian, kegiatan pengangkutan ditempatkan dalam sistem yang lebih terukur dan memiliki prosedur yang jelas.

Selain waktu pengiriman, *Staatsblad* No. 415 juga mengatur tanggung jawab terhadap barang yang diangkut. Apabila barang harus diteruskan ke tempat yang tidak berada langsung pada jalur trem atau jalur penghubung, pengangkutan dapat dilakukan melalui pihak lain dengan risiko tertentu yang dibebankan kepada pengirim. Namun, apabila pengangkutan lanjutan tersebut dilakukan oleh pihak yang bekerja untuk layanan trem, tanggung jawab terhadap pengangkutan tetap berada pada layanan trem.

Pengaturan tersebut memperlihatkan adanya usaha untuk memperjelas hubungan antara perusahaan angkutan, pengirim, dan barang yang diangkut. Tanggung jawab tidak hanya diperhitungkan ketika barang berada pada satu jalur transportasi, tetapi juga ketika proses pengiriman melibatkan jaringan yang saling terhubung. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan kereta api dan trem dipandang sebagai suatu sistem pengangkutan yang membutuhkan aturan mengenai prosedur dan pembagian tanggung jawab.

Pengaturan terhadap proses pengangkutan tersebut berkaitan pula dengan persoalan infrastruktur jalan. Hal ini terlihat dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 418 berjudul *Wegen. Kunstwerken. Landbouw. Nijverheid*. Berbeda dengan *Staatsblad* No. 415 yang mengatur pelayanan pengangkutan, ketentuan ini memperlihatkan hubungan antara kegiatan pengangkutan, penggunaan jalan, dan aktivitas ekonomi. *Staatsblad* No. 418 mencabut ordonansi tahun 1905 yang sebelumnya mewajibkan perusahaan pertanian dan industri swasta di Jawa dan Madoera membiayai perbaikan kerusakan jalan yang disebabkan oleh kegiatan *karretransport*.

Dalam aturan tahun 1905 tersebut, kewajiban pembayaran berlaku apabila kerusakan yang ditimbulkan oleh *karretransport* melebihi kerusakan yang secara umum disebabkan oleh lalu lintas biasa dan kondisi setempat. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya hubungan langsung antara kegiatan pengangkutan dan kondisi infrastruktur jalan.(Dara Sylvia 2025) Aktivitas perusahaan pertanian dan industri tidak sepenuhnya dipisahkan dari persoalan pemeliharaan jalan karena penggunaan kendaraan untuk kegiatan ekonomi dipandang dapat memberikan beban tambahan terhadap infrastruktur.

Hubungan antara jalan dan kegiatan ekonomi juga dapat dilihat dalam penelitian Hartatik mengenai perkembangan jalan raya Pantai Utara Jawa.(Endah Sri Hartatik 2016)ma Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan jalan memiliki hubungan dengan perkembangan pusat-pusat ekonomi dan memudahkan pergerakan barang dari produsen kepada konsumen. Meskipun penelitian tersebut membahas periode dan wilayah yang lebih luas, temuan tersebut membantu menjelaskan bahwa jalan dalam

konteks kolonial memiliki fungsi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, bukan hanya sebagai sarana lalu lintas.

Sementara itu, perkembangan jaringan transportasi di Madoera juga memperlihatkan hubungan antara sarana transportasi dan kegiatan ekonomi. Penelitian Mahdiyar dan kawan-kawan mengenai *Madoera Stoomtram Maatschappij* menunjukkan bahwa jaringan kereta api di Madura pada awalnya berkaitan dengan pengangkutan komoditas, terutama garam, sebelum kemudian berkembang sebagai sarana transportasi umum.(Faniesa Ardianti Mahdiyar, Naning Siregar Pribumi, Sopia Nabila 2022) Dalam konteks penelitian ini, temuan tersebut dapat digunakan untuk melihat bahwa pengaturan dalam *Staatsblad* No. 415 merupakan bagian dari lingkungan transportasi yang juga berhubungan dengan kegiatan pengangkutan barang di Madoera.

Hubungan antara transportasi dan kegiatan ekonomi juga terlihat dalam penelitian Yusi Ratnawati mengenai perkembangan perkeretaapian pada masa kolonial di Semarang. Penelitian tersebut memperlihatkan perkembangan jaringan kereta api dalam kaitannya dengan kebutuhan pengangkutan dan perkembangan kegiatan ekonomi.(Yusi Ratnawati 2015) Hal ini dapat menjadi pembanding bahwa pengembangan jaringan transportasi pada masa kolonial tidak terlepas dari kebutuhan untuk menghubungkan wilayah produksi dengan pusat kegiatan ekonomi.

Dengan demikian, ketentuan mengenai kereta api, trem, dan jalan menunjukkan bahwa transportasi memiliki hubungan dengan kegiatan ekonomi di Jawa dan Madoera. Namun, hubungan tersebut perlu dipahami secara hati-hati. *Staatsblad* tahun 1906 tidak secara langsung menyatakan bahwa setiap aturan transportasi dibuat untuk meningkatkan kegiatan pertanian atau industri. Sumber tersebut lebih jelas menunjukkan bagaimana baranpemerintah mengatur pelayanan pengangkutan, tanggung jawab, serta penggunaan dan pemeliharaan infrastruktur. Hubungan dengan kegiatan ekonomi kemudian dapat dipahami melalui jenis aktivitas yang diatur, khususnya pengangkutan barang dan penggunaan kendaraan oleh perusahaan pertanian serta industri.(Yusi Ratnawati 2015)

Hubungan antara kegiatan ekonomi dan pemeliharaan jalan tersebut mengalami perubahan pada tahun 1906. Melalui *Staatsblad* No. 418, pemerintah kolonial mencabut ordonansi tahun 1905 mengenai kewajiban perusahaan pertanian dan industri untuk membiayai perbaikan kerusakan jalan akibat *karretransport*. Pembayaran yang sebelumnya telah dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut juga ditetapkan untuk dikembalikan.

Pencabutan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kolonial terhadap transportasi dan infrastruktur tidak bersifat tetap. Aturan yang sebelumnya memberikan beban pemeliharaan jalan kepada perusahaan pertanian dan industri dapat dievaluasi dan kemudian dihentikan. Dengan demikian, *Staatsblad* tidak hanya memperlihatkan keberadaan suatu kebijakan, tetapi juga menunjukkan perubahan dalam hubungan antara pemerintah, perusahaan swasta, dan infrastruktur transportasi.

Perubahan tersebut dapat dipahami dalam konteks perkembangan transportasi kolonial di Jawa. Dara Sylvia menunjukkan bahwa perkembangan transportasi darat di Jawa pada masa kolonial berkaitan dengan kepentingan pemerintah kolonial dan perkembangan jaringan transportasi.(Dara Sylvia 2025) Dalam konteks penelitian ini, *Staatsblad* tahun 1906 memperlihatkan sisi administratif dari perkembangan tersebut, yaitu bagaimana pemerintah menetapkan aturan mengenai pelayanan pengangkutan, penggunaan jalan, dan tanggung jawab terhadap infrastruktur.

Transportasi dalam Tata Kelola Ekonomi Kolonial

Jika ketentuan *Staatsblad* No. 415 dan No. 418 dibaca secara bersamaan, terlihat bahwa pengaturan transportasi pada tahun 1906 tidak berdiri sendiri.(Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1906) Pengaturan waktu pengiriman dan tanggung jawab dalam kereta api serta trem berkaitan dengan proses pergerakan barang, sedangkan aturan mengenai *karretransport* berkaitan dengan penggunaan jalan oleh kegiatan pertanian dan industri. Keduanya menunjukkan bahwa transportasi berada dalam hubungan yang erat dengan kegiatan produksi dan distribusi.

Dalam hal ini, jaringan transportasi dapat dipahami sebagai bagian dari tata kelola ekonomi kolonial. Pengaturan waktu dan tanggung jawab pada kereta api dan trem menunjukkan adanya kebutuhan untuk membuat proses pengangkutan lebih teratur. Sementara itu, aturan mengenai kerusakan jalan menunjukkan bahwa penggunaan infrastruktur oleh kegiatan ekonomi menimbulkan persoalan administratif yang perlu diatur oleh pemerintah. Dengan kata lain, perhatian pemerintah tidak hanya ditujukan pada keberadaan sarana transportasi, tetapi juga pada bagaimana sarana tersebut digunakan dan siapa yang bertanggung jawab atas akibat penggunaannya.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Dara Sylvia mengenai perkembangan transportasi darat di Jawa pada masa kolonial yang menunjukkan bahwa perkembangan transportasi berkaitan dengan kepentingan pemerintah dan pengelolaan wilayah.

Penelitian Hartatik juga menunjukkan bahwa perkembangan jaringan jalan berkaitan dengan perkembangan hubungan antardaerah dan aktivitas ekonomi. Kedua penelitian tersebut membantu menempatkan ketentuan *Staatsblad* tahun 1906 dalam konteks perkembangan transportasi kolonial, sementara penelitian ini secara khusus melihatnya melalui regulasi resmi pemerintah.

Pengaturan tahun 1906 juga menunjukkan bahwa transportasi tidak dapat dipisahkan dari kepentingan pemerintah dalam mengelola wilayah kolonial. Jaringan kereta api, trem, dan jalan menyediakan sarana bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi, sedangkan regulasi memberikan batas mengenai bagaimana jaringan tersebut digunakan. Dalam hal ini, kebijakan transportasi menjadi salah satu bentuk administrasi kolonial yang menghubungkan kepentingan pemerintah dengan aktivitas perusahaan dan kegiatan pengangkutan.

Penelitian Fauziah mengenai perkembangan Malioboro menunjukkan bahwa jalan pada masa kolonial juga memiliki fungsi yang lebih luas dalam perkembangan ruang ekonomi perkotaan.(Siti Mahmudah Nur Fauziah 2018) Jalan tidak hanya menjadi jalur lalu lintas, tetapi berkaitan dengan perkembangan aktivitas ekonomi dan perubahan ruang kota. Meskipun konteksnya berbeda, penelitian tersebut memperkuat pemahaman bahwa infrastruktur jalan dalam masyarakat kolonial memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar sarana perpindahan.(Nanang Setiawan 2024)

Dalam penelitian ini, fungsi tersebut terlihat melalui aturan yang menghubungkan penggunaan jalan dengan kegiatan pertanian dan industri. Namun, sumber *Staatsblad* yang digunakan tidak cukup untuk mengukur secara langsung peningkatan produksi, jumlah barang yang diangkut, atau keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan. Oleh sebab itu, hubungan antara regulasi transportasi dan kepentingan ekonomi dalam penelitian ini dipahami melalui isi dan arah kebijakan, bukan melalui pengukuran dampak ekonomi secara kuantitatif.

Posisi Penelitian Terhadap Kajian Sebelumnya

Penelitian mengenai transportasi kolonial sebelumnya telah membahas berbagai aspek. Mahdiyar dan kawan-kawan berfokus pada perkembangan *Madoera Stoomtram Maatschappij* serta fungsinya dalam pengangkutan komoditas dan transportasi umum. Hartatik membahas perkembangan jalan raya dan hubungan jaringan transportasi di Jawa, sedangkan Yusi Ratnawati membahas perkembangan perkeretaapian pada masa kolonial

di Semarang. Fauziah membahas perubahan fungsi jalan dalam perkembangan ruang ekonomi perkotaan, sementara Dara Sylvia dan Nanang Setiawan membahas perkembangan jaringan transportasi darat pada masa kolonial di Jawa.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada ketentuan resmi pemerintah kolonial yang tercatat dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* tahun 1906. Fokus tersebut memungkinkan penelitian melihat transportasi dari sisi kebijakan dan tata kelola, khususnya mengenai pengaturan waktu pengiriman, tanggung jawab perusahaan angkutan, penggunaan jalan, serta hubungan antara aktivitas transportasi dengan perusahaan pertanian dan industri.

Dengan demikian, *Staatsblad* No. 415 dan No. 418 memperlihatkan bahwa pengaturan transportasi di Jawa dan Madoera pada tahun 1906 mencakup aspek pelayanan pengangkutan sekaligus infrastruktur yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Regulasi mengenai kereta api dan trem menunjukkan usaha untuk menciptakan keteraturan dalam pengiriman barang dan pembagian tanggung jawab, sedangkan aturan mengenai *karretransport* menunjukkan hubungan antara aktivitas ekonomi dan pemeliharaan jalan. Perubahan kebijakan melalui pencabutan aturan tahun 1905 juga memperlihatkan bahwa hubungan tersebut dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan kebijakan pemerintah kolonial.

Temuan ini menunjukkan bahwa transportasi pada awal abad ke-20 bukan hanya persoalan teknis perjalanan, tetapi juga bagian dari tata kelola kolonial. Meskipun *Staatsblad* tidak secara langsung menggambarkan pengalaman masyarakat sebagai pengguna transportasi, sumber tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana pemerintah kolonial mendefinisikan tanggung jawab, mengatur pelayanan pengangkutan, dan menata hubungan antara transportasi, infrastruktur, serta kegiatan pertanian dan industri di Jawa dan Madoera pada tahun 1906.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan transportasi dan jalan di Jawa dan Madoera tahun 1906, dapat disimpulkan bahwa pemerintah kolonial memiliki sejumlah ketentuan yang mengatur kegiatan pengangkutan serta tanggung jawab terhadap infrastruktur transportasi. *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* tahun 1906, khususnya Staatsblad No. 415, menunjukkan adanya pengaturan mengenai pelayanan pengangkutan melalui kereta api dan trem, seperti ketentuan waktu pengiriman, pengangkutan lanjutan,

serta tanggung jawab perusahaan pengangkutan terhadap barang. Sementara itu, Staatsblad No. 418 memperlihatkan adanya perubahan ketentuan mengenai tanggung jawab perusahaan pertanian dan industri terhadap kerusakan jalan yang disebabkan oleh kegiatan pengangkutan.

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara transportasi, jalan, dan kegiatan pertanian serta industri di Jawa dan Madoera. Infrastruktur transportasi tidak hanya menjadi bagian dari pergerakan manusia dan barang, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah kolonial. Dengan demikian, *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* tahun 1906 memperlihatkan bahwa pengaturan transportasi dan jalan merupakan bagian dari tata kelola pemerintah kolonial yang mengatur hubungan antara kegiatan pengangkutan, pemanfaatan infrastruktur, serta aktivitas ekonomi pada awal abad ke-20.

DAFTAR PUSTAKA

Dara Sylvia. 2025. "Perkembangan Transportasi Darat Di Jawa Masa Kolonial." *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah* 16(2): 1–21.

Endah Sri Hartatik. 2016. "Perkembangan Jalan Raya Di Pantai Utara Jawa Tengah Sejak Mataram Islam Hingga Pemerintah Daendels." 26(2).

Faniesa Ardianti Mahdiyar, Naning Siregar Pribumi, Sopia Nabila, Ari Sapto. 2022. "Madoera Stoomtram Maatschappij : Fungsi Perkeretaapian Sebagai Pengangkutan Garam Hingga Transportasi Umum Di Madura Tahun 1897-1987." *Historiography: Journal of Indonesian History and Education* 2(Januari): 1–12.

Nanang Setiawan. 2024. "Jejak Infrastruktur: Perkembangan Jaringan Transportasi Regentschap Lumajang Periode Kolonial Tahun 1884-1934." *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah* 15(2): 87–111.

Siti Mahmudah Nur Fauziah. 2018. "Dari Jalan Kerajaan Menjadi Jalan Pertokoan Kolonial : Malioboro 1756-1941." *Lembaran Sejarah* 14(2).

"Staatsblad van Nederlandsch-Indië." 1906.

Yusi Ratnawati. 2015. "Perkembangan Perkeretaapian Pada Masa Kolonial Di Semarang Tahun 1867-1901." *Journal Of Indonesia History* 3(2): 65–69.